

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Komunikasi dapat dipahami sebagai proses penyampaian pesan, ide, atau informasi kepada orang lain dengan menggunakan sarana tertentu guna mempengaruhi atau mengubah perilaku penerima pesan. Komunikasi Massa adalah komunikasi melalui media massa atau komunikasi kepada banyak orang (massa) dengan menggunakan sarana media. Media massa sendiri ringkasan dari media atau sarana komunikasi massa.

Media massa adalah alat yang digunakan dalam penyampaian pesan-pesan dari sumber kepada khalayak (menerima). Media massa sangat berperan dalam perkembangan atau bahkan perubahan pola tingkah laku dari suatu masyarakat, oleh karena itu kedudukan media massa dalam masyarakat sangatlah penting. Dengan adanya media massa, masyarakat yang tadinya dapat dikatakan tidak beradab dapat menjadi masyarakat yang beradab. Hal itu disebabkan, oleh karena media massa mempunyai jaringan yang luas dan bersifat massal sehingga masyarakat yang membaca tidak hanya orang-perorang tapi sudah mencakup jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan pembaca, sehingga pengaruh media massa akan sangat terlihat di permukaan masyarakat.

Media massa dalam masyarakat mempunyai beberapa fungsi diantaranya, fungsi informasi, fungsi hiburan, fungsi persuasi, fungsi transmisi budaya, fungsi

mendorong kohesi sosial, fungsi pengawasan, fungsi korelasi pewarisan sosial, fungsi melawan kekuasaan dan kekuatan refresif, dan fungsi menggugat hubungan trikotomi.

Kebutuhan akan informasi saat ini berkembang sangat pesat. Setiap harinya, masyarakat mengkonsumsi media demi memenuhi kebutuhan informasi mereka. Media menjadi pilihan yang sangat tepat untuk memperoleh informasi baik dari dalam maupun luar negeri.

Televisi adalah salah satu contoh dari media massa elektronik. Televisi merupakan gabungan dari media dengar dan gambar hidup (gerak/live) yang bisa bersifat politis, informatif, hiburan, pendidikan, atau bahkan gabungan dari ketiga unsur tersebut.

Perkembangan dunia pertelevisian di Indonesia berkembang dengan pesat, seperti banyak bermunculan TV swasta, seperti METRO TV, RCTI, TV ONE, SCTV, INDOSIAR, TRANS TV, TRANS 7 dll. Semua station televisi tersebut saling bersaing membuat tontonan informasi, hiburan, dan pendidikan dengan berbagai cara untuk menarik penontonnya.

Sekarang ini persaingan dunia pertelevisian di Indonesia sangat ketat, semua stasiun televisi berlomba-lomba agar program acaranya mendapatkan rating tinggi. Namun untuk mendapatkan rating tinggi bukan cara yang mudah. Stasiun TV harus membuat acara yang baik agar dapat menarik perhatian penonton.

Stasiun-stasiun televisi terus melangkah dan tetap mencoba menyajikan informasi yang dibutuhkan oleh khalayak. Akan tetapi bukanlah proses yang mudah untuk bisa menghasilkan berita dengan nilai akuntabilitas tinggi. Dalam

proses produksi berita dibutuhkan perencanaan dan pelaksanaan yang cermat agar kepercayaan khalayak tetap terjaga.

Banyak hal yang diperlukan dalam penulisan berita. Semua data dan fakta yang diperoleh tidak begitu saja disajikan sebenar-benarnya kepada khalayak. Setiap media memiliki *frame* berita masing-masing pada penulisan beritanya. Yang nantinya akan berpengaruh terhadap arah pemberitaan.

Misalnya kasus Badan Anggaran dan KPK, Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas kasus dugaan suap di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) sampai ke Badan Anggaran (Bangar) DPR (<http://www.tribunnews.com>). Menurut Gultom (2006) KPK dalam penanganan kasusnya hendaknya menggandeng aparat penegak hukum lainnya, seperti kepolisian dan kejaksaan, termasuk aparat pihak terkait dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Menurut Sekjen FITRA Yuna Farhan, munculnya kasus suap Kemenakertrans bermula dari Bangar DPR. "Meminta KPK untuk mengusut kasus Kemenakertrans sampai ke Badan Anggaran DPR sebagai sumber persoalan. Bangar DPR juga yang membuka peluang terjadinya suap di Kemenakertrans. Jadi, KPK harus bidik Bangar DPR," ujar Yuna dalam jumpa pers, di Warung Daun Resto, Jakarta, (18/9/2011) (<http://www.tribunnews.com>).

Selain itu, FITRA pun meminta kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigative pada kasus Kemenakertrans. "Khususnya berkaitan dengan kemungkinan dengan adanya tumpang tindih antara alokasi anggaran infrastruktur Transmigrasi pada Tugas Pembantu dan DPPID di sepuluh Daerah, serta triple budget pada bidang lain," katanya

Dalam kesempatan yang sama, Koordinator FITRA Uchok Sky Kadafi menyatakan, hampir semua partai di Badan Anggaran DPR terlibat dalam kasus tersebut. Namun, saat diminta konfirmasi siapa saja yang anggota Banggar DPR yang memiliki transaksi mencurigakan, ia enggan menjawab (<http://www.tribunnews.com>).

Akhirnya, Empat pimpinan Badan Anggaran DPR yang terdiri dari Ketua Banggar Melchias Mekeng, (FPG) Wakil Ketua Mirwan Amir (FPD), Wakil Ketua Tamsil Linrung (FPKS) serta Wakil Ketua Olly Dondokambey (FPDIP) dipanggil KPK terkait kasus suap di Kemenakertrans (<http://nasional.inilah.com>).

Anggota Badan Anggaran (Banggar) dari Fraksi PPP DPR RI Hasrul Azwar mengatakan pemeriksaan pimpinan Banggar terkait kasus di Kemenakertrans positif sebagai langkah awal transparansi anggaran di parlemen. “Pimpinan Banggar saya harapkan tidak ada kesan untuk menutup-nutupi, terbuka saja. Jangan ada kesan menutupi, akhirnya KPK punya bahan, kita buka saja,” pintanya kepada wartawan di gedung DPR, Jakarta, Selasa (20/9/2011) (<http://nasional.inilah.com>).

Dia mengaku risih dengan stigma buruk yang selama ini melekat pada Banggar. Apalagi, kata Ketua Fraksi PPP DPR RI ini, belum lama ini beredar SMS yang menyebutkan calo anggaran dengan menyebut beberapa nama anggota Banggar DPR RI. “SMS yang beredar di DPR kemarin mengganggu saya karena ada dua kader PPP yang dianggap menjadi calo anggaran yakni Irgan dan Machmud Yunus,” katanya sembari menunjukkan isi SMS secara lengkap (<http://nasional.inilah.com>).

Hasrul menegaskan pola kerja di Banggar sejatinya dilakukan secara terbuka. Dia menjelaskan pembahasan anggaran polanya sebelumnya dibahas di setiap komisi secara detail dan satuan satu hingga tiga, baru kemudian dibawa ke Banggar. “Di Banggar dibahas bersama eksekutif. Jadi peluang koruptif secara teoritis tidak ada,” tepisnya (<http://nasional.inilah.com>).

Sementara Wakil Ketua DPR RI Anis Matta merespons positif panggilan pimpinan Banggar oleh KPK sebagai saksi kasus suap Kemenakertrans terkait Dana Peningkatan Infrastruktur Daerah (DPID). “Ini kan terkait mekanisme. Dalam kasus Kemenakertrans anggaran belum turun,” katanya (<http://nasional.inilah.com>).

Terkait kadernya di Banggar yakni Tamsil Linrung yang dikaitkan dengan praktik calo anggaran, Anis Matta mempersilahkan diproses sesuai mekanisme hukum sepanjang ada bukti. “Diproses saja. Serahkan pada mekanisme yang ada,” tegasnya (<http://nasional.inilah.com>).

Dia juga menolak melakukan klarifikasi internal PKS terkait nama Tamsil Linrung yang kerap disebut-sebut dalam kasus Dana Peningkatan Infrastruktur Daerah (DPID). Bagi Anis, klarifikasi internal tidak memiliki manfaat apapun. “Kalau klarifikasi internal apa gunanya? Toh ini masalah hukum, ini tidak ada kekuatan hukum, apa gunanya,” ujarnya (<http://nasional.inilah.com>).

Sumber internal di Banggar menyebutkan kasus DPID sejatinya melibatkan peran pimpinan Banggar. Pola kerjanya, sambung sumber tersebut, rancangan anggaran didrop dari Kementerian Keuangan langsung ke pimpinan

Banggar. “Nah di pimpinan Banggar diselesaikan dengan Kemenkeu,” kata sumber tersebut (<http://nasional.inilah.com>).

Yang menarik dua pimpinan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat, Tamsil Linrung dan Olly Dondokambey, tidak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (<http://nasional.vivanews.com>).

Tamsil yang menjadi Wakil Ketua Banggar itu menjelaskan bahwa dan rekannya, Olly, sengaja tidak menghadiri panggilan KPK hari ini (<http://nasional.vivanews.com>).

Menanggapi hal itu, ketua KPK Busyro Muqoddas mengatakan, pihaknya akan melakukan evaluasi dan kemudian akan kembali memanggil Tamsil dan Olly (<http://nasional.vivanews.com>).

Media televisi yang mengangkat isu ini diantaranya Metro TV dan TV One dalam program acara talkshow. Metro TV dalam program acara Today's Dialogue dan TV One dalam program acara Apa Kabar Indonesia Malam. Alasan penulis mengambil program acara talkshow Apa Kabar Indonesia Malam di TV One dan Today's Dialogue di Metro TV, karena keduanya merupakan program talkshow, akan tetapi penyajiannya berbeda. Apa Kabar Indonesia Malam tayang pada hari Senin - Jumat, Pukul 20.00 - 21.00 WIB. Tempat *shooting* diluar studio TV One yaitu di Wisma Nusantara Bundaran HI dan citiwalk Sudirman. Sedangkan Today's Dialogue tayang pada hari Selasa, Pukul 21.30 – 22.30 WIB. Tempat *shooting* di studio Metro TV. Gambaran cara melakukan dialog kedua program acara tersebut misalnya, Apa Kabar Indonesia Malam terlihat lebih santai, bersahabat dan nyaman karena *shooting* dilakukan diluar studio TV One,

para narasumber berebutan untuk bicara sehingga keadaan terlihat gaduh dan ramai. Selain itu program Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan juga diselengi dengan nyanyian dari bintang tamu. Sedangkan Today's Dialogue terlihat lebih serius karena *shooting* dilakukan di studio Metro TV dan para narasumber bergiliran untuk berbicara sehingga terlihat teratur.

TV One dalam program talkshow Apa Kabar Indonesia Malam mengangkat judul “ Polemik Badan Anggaran DPR – KPK “, narasumber nya antara lain Effendi Gazali sebagai Praktisi Komunikasi Politik, Ridwan Saidi sebagai Mantan Anggota DPR dan Budayawan Betawi, Arswendo Atmowiloto sebagai Penulis dan Wartawan Indonesia, Yoris Raweyai sebagai Anggota Komisi I DPR dan Sys Ns sebagai Politisi, Aktor, Sutradara dan salah satu pendiri Partai Demokrat. Sedangkan di Metro TV dalam program talkshow Today's Dialogue mengangkat judul “ Badan Anggaran vs KPK “, narasumber nya antara lain Zulfakar Akbar sebagai Komisi IV dan Anggota Banggar, Muhammad Said Didu sebagai Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Saldi Isra sebagai Pakar Hukum Tata Negara, dan Hanta Yuda sebagai Pengamat Politik atau Peneliti *The Indonesian Institute*, selain itu ada satu narasumber lagi, akan tetapi beliau dihubungi melalui telepon yaitu Johan Budi sebagai Juru Bicara KPK.

Mengapa penulis mengambil berita mengenai kasus Badan Anggaran DPR – KPK, karena ini bukan pertama kali Badan Anggaran DPR dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berseteru. Dalam kasus ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mogok melakukan RAPBN 2012 gara-gara tersinggung karena empat pimpinannya dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka diperiksa terkait kasus suap Kemenakertrans. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) seharusnya tidak melakukan hal seperti itu, karena DPR sebagai wakil rakyat seharusnya

mengedepankan kepentingan rakyat bukan malah menyampingkan kepentingan rakyat.

Alasan memilih media televisi TV One dan Metro TV adalah karena kedua media televisi tersebut terkesan menentang pemerintahan dan pemilik masing-masing media tersebut diantaranya pemilik TV One yaitu Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum Partai Golkar sedangkan pemilik Metro TV yaitu Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasdem. Kedua orang tersebut sama-sama yang memiliki ambisi di Pemilu 2014 yang akan datang.

Setiap media memiliki cara sendiri untuk mengemas berita yang akan mereka sajikan. Semua realitas yang ada tidak begitu saja disajikan apa adanya. Melainkan semua ini harus melalui mekanisme yang berlaku, termasuk konsep *framing* yang selalu digunakan media dalam penulisan beritanya. Begitu pula dengan media televisi TV One dan Metro TV. Mereka juga punya cara sendiri dalam membingkai berita.

Media dapat menuliskan berita sesuai ideologi atau nilai dari masing-masing media. Dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk melihat dan membandingkan berita tersebut melalui *frame* yang dipakai masing-masing media, yakni dari media televisi TV One dan Metro TV. Dengan membandingkan *framing* kedua media tersebut, penulis akan menemukan konsep *framing* yang digunakan masing-masing media dalam mengemas berita yang mereka sajikan. Dengan demikian, penulis membuat judul “ FRAMING BERITA KASUS BADAN ANGGARAN DPR dan KPK di MEDIA TELEVISI TV ONE dan METRO TV.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

“Bagaimana media televisi TV One dan Metro TV membingkai berita kasus Badan Anggaran DPR dan KPK?.”

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, tujuan yang ingin digambarkan penulis yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Berikut penjabarannya.

1.3.1 Tujuan Umum

Dalam studi ilmu komunikasi khususnya bidang penyiaran televisi (*broadcasting*) perlu mengetahui bagaimana media televisi TV One dan Metro TV membingkai berita kasus Badan Anggaran dan KPK.

1.3.2 Tujuan Khusus

Melakukan sebuah penelitian dengan analisis *framing* untuk mengetahui bagaimana media televisi TV One dan Metro TV membingkai berita kasus Badan Anggaran dan KPK.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Berikut penjabarannya.

1.4.1 Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berarti dan menambah kajian ilmu komunikasi khususnya ilmu kepenyiaran (*broadcasting*) untuk mengetahui bagaimana media televisi TV One dan Metro TV mbingkai berita kasus Badan Anggaran DPR dan KPK.

1.4.2 Secara Praktis

1. Memberikan manfaat dan masukan bagi Metro TV dan TV one agar pemberitaannya lebih semakin kritis dan objektif lagi disamping aktual dan faktual agar mutu pemberitaannya menjadi semakin lebih baik lagi.
2. Bermanfaat untuk menambah wawasan dan pemahaman penulis dalam memahami bagaimana media televisi TV One dan Metro TV mbingkai berita kasus Badan Anggaran dan KPK.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman dalam penelitian ini, penulis akan menyusun secara sistematis dan membagi dalam lima bab pokok bahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I

Pendahuluan yang didalamnya berisi uraian latar belakang masalah serta alasan yang mendasari penulis meneliti masalah itu sebagai tema dari skripsi ini.

Kemudian diuraikan pula masalah pokok, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II

Tinjauan Pustaka didalamnya berisi penjelasan dari konsep-konsep dan teori-teori yang berkaitan dengan masalah pokok serta alasan pemilihannya yang relevan dengan penelitian yang kemudian dirangkum dalam sebuah bagan kerangka pemikiran.

BAB III

Metode Penelitian, pada bab metode penelitian di dalamnya terdapat desain Penelitian, unit analisis, teknik pengumpulan data, reliabilitas, metode analisis data.

BAB IV

Hasil penelitian, di dalamnya terdapat subyek penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan.

BAB V

Penutup di dalamnya terdapat uraian kesimpulan atas penelitian dan sedikit saran guna melengkapi penutup.